

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam PermenKP nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah saatnya melihat laut sebagai sumber kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menempatkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kekayaan laut secara berkelanjutan.

Didalam upaya mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis selama 5 tahun periode tahun 2015-2019 dan secara berjenjang diturunkan dalam dokumen tahunan Renja-KL (Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga) yang

memuat rencana aksi beserta indikator target capaian. Adapaun target untuk tahun 2016 adalah sebagaimana gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber Data : Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan. Penyerapan anggaran dapat dikatakan telah terjadinya pelaksanaan program dan kegiatan. Didalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), lebih menitik beratkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhan

adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut dan dalam artian telah terjadi proses pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun bahkan tidak terserap atau terdapat sisa anggaran, sedangkan diawal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik, bahwa tidak sedikit insititusi yang kurang memiliki daya serap anggaran pada awal pertengahan tahun anggaran.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka efektifitas dan efisiensi atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan atas optimalisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan menerapkan sistem pengenaan sanksi melalui pemotongan pagu belanja atas anggaran yang tidak terserap sehingga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 31 Desember 2015.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam Web majalah Kontan tanggal 26 Agustus 2014 sebelumnya pernah mengatakan, salah satu penghambat K/L mendapatkan reward adalah rendahnya serapan anggaran. Soalnya, K/L tidak merencanakan program secara matang, sehingga sulit melengkapi dokumen saat akan mencairkan dananya. Dalam kasus seperti itu, Kementerian Keuangan biasanya juga menjatuhkan sanksi berupa pembekuan anggaran. Dana tidak bisa cair dan dilarang untuk dialihkan ke kegiatan lain. Ini untuk mendidik masing-masing K/L agar disiplin, Kontan tanggal 26

Agustus 2014.(<http://kesehatan.kontan.co.id/news/syarat-kementerian-dapat-penghargaan-makin-ketat>)

Berdasarkan PMK nomor 258/PMK.02/2015 dalam kriteria pemberian penghargaan pada pasal 3 ayat 2 disebutkan capaian kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga diantara :

- persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen);
- persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian

Kinerja anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sehingga didalam kaitan terhadap apa yang akan penulis teliti dibatasi kinerja Anggaran

TABEL 1
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TA. 2015

| NO | NAMA UNIT KERJA | PAGU | REALISASI | % | SISA |
|----|--|--------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | SEKRETARIAT JENDERAL | 448,127,536,000 | 427,837,929,424 | 95.47% | 20,289,606,576 |
| 2 | INSPEKTORAT JENDERAL | 75,156,000,000 | 74,441,815,626 | 99.05% | 714,184,374 |
| 3 | DITJEN PERIKANAN TANGKAP | 2,674,538,689,000 | 2,248,512,570,153 | 84.07% | 426,026,118,847 |
| 4 | DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA | 1,361,503,449,000 | 1,265,491,174,880 | 92.95% | 96,012,274,120 |
| 5 | DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1,529,542,518,000 | 1,221,872,321,085 | 79.88% | 307,670,196,915 |
| 6 | DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP) | 1,008,866,500,000 | 897,907,012,264 | 89.00% | 110,959,487,736 |
| 7 | DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K) | 1,382,359,292,000 | 1,150,128,545,906 | 83.20% | 232,230,746,094 |
| 8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 778,312,829,000 | 622,649,398,244 | 80.00% | 155,663,430,756 |
| 9 | BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN | 910,278,329,000 | 883,088,382,435 | 97.01% | 27,189,946,565 |
| 10 | BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN | 499,088,378,000 | 484,419,504,087 | 97.06% | 14,668,873,913 |
| | Total | 10,667,773,520,000 | 9,276,348,654,104 | 86.96% | 1,391,424,865,896 |

Sumber : On Span , Kementerian Keuangan RI

Dalam Tabel 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2015 teralokasi anggaran sebesar Rp 10.667.773.520.000 dan penyerapan sebesar Rp 9.276.348.654.104 sehingga terdapat sisa sebesar Rp 1.391.424.865.896 adapun persentase penyerapan anggaran lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2015 adalah sebesar Rp 86,96% . Apabila di rinci lagi ada 5

unit kerja eselon I yang berkontribusi penyerapan KKP dibawah 95 % adalah : Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 84,07%, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 79,88 %, Ditjen Peningkatan Daya Saing sebesar 89,00 %, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 83,20 %, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 80,00 %. Dari penyerapan yang dibawah target tersebut berpotensi KKP akan menerima *punishment* khususnya unit kerja yang kinerja anggaranya dibawah 95%.

Dari uraian tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan kinerja organisasi khususnya kinerja anggaran maupun dampak sebagai dapat penyerapan anggaran dibawah target diantaranya :

1. Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan , untuk tahun 2015 sebesar 86,96 % dibawah target 95 %;
2. Adanya potensi *punishment* berupa pemotongan anggaran sebagai akibat penyerapan rendah dibawah 95 %;
3. Anggaran tidak terserap mengakibatkan banyak kegiatan atau infrastruktur di rencanakan ditahun berjalan batal atau tertunda.
4. Potensi pemotongan anggaran secara umum akan mempengaruhi alokasi anggaran tahun berikutnya (n+2) sebesar angka yang tidak mampu diserap
5. Perubahan/pengurangan target dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarga nelayan

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah, Pasal 2 ayat 1 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam pencapaian program dan anggaran program KKP tersebut perlu pengawasan melalui monitoring dan evaluasi sebagai informasi capaian dukungan terhadap program KKP tersebut. Inspektorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mempunyai peran dalam proses pengawalan program prioritas KKP. Dengan jumlah SDM pengawas yang jumlah terbatas dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja

yang luas meliputi satuan kerja pusat, UPT dan tugas pembantuan (TP) serta desentralisasi untuk tahun 2016 sebanyak 815 satker memerlukan anggaran besar dan membutuhkan waktu relatif lama untuk pengendalian dan pengawasan.

Tabel 2

Jumlah Satuan Kerja (Satker) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2016

| KD UNIT | NAMA UNIT | JML SATKER |
|---------|----------------------|------------|
| 1 | Sekretariat Jenderal | 43 |
| 2 | Inspektorat Jenderal | 1 |
| 3 | Ditjen PT | 75 |
| 4 | Ditjen PB | 262 |
| 5 | Ditjen PSDKP | 45 |
| 6 | Ditjen PDSPKP | 135 |
| 7 | Ditjen PRL | 126 |
| 11 | BALITBANG KP | 19 |
| 12 | BPSDMP KP | 58 |
| 13 | BKIPM | 51 |
| Jumlah | | 815 |

Selain itu sumber data sebagai bahan analisa yang diterima oleh satker disampaikan dalam berbagai format berbeda-beda-beda diantaranya *ms word*, *ms excel*, dan *power point* sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan memerlukan waktu yang cukup lama serta dimungkinkan terjadi kesalahan data sehingga informasi cepat dan *valid* dilapangan belum tersedia tepat waktu sehingga proses kebijakan dalamantisipasi perubahan dan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran belum dapat segera diputuskan oleh para pemangku kebijakan.

Informasi pencapaian pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan tercermin diantaranya melalui penyerapan anggaran seperti dijelaskan diatas juga dalam rangka akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Di dalam era globalisasi ini semua telah dilakukan secara teknologi cepat, akurat dan praktis. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem teknologi informasi untuk menunjang kegiatan strategis dalam rangka membantu

mewujudkan program kerja KKP, karena hal tersebut Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2015 membangun sistem informasi pengendalian dan pengawasan yang disebut e-Dalwas berbasis *on line* sebagai informasi untuk pengambilan keputusan dengan harapan tersediannya informasi yang cepat dan akurat. Pelaksana aplikasi ini adalah setiap operator e-Dalwas dari setiap Satuan Kerja. Sistem aplikasi ini dijalankan oleh operator dengan mengisi data pencapaian target kegiatan dan anggaran serta realisasinya serta pengisian perencanaan keuangan (POK) untuk setiap kegiatan dan akun belanja selama satu tahun. Namun rata-rata para operator juga diberikan tanggungjawab / memegang beberapa aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia diantara :

1. Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/RKAKL.
2. Aplikasi Sistem Akuntansi Indonesia/SAI.
3. Aplikasi Surat Perintah Membayar/SPM
4. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/SIRUP
5. Sistem aplikasi E-Bappenas

hal ini tentu saja mempengaruhi beban kerja dan proses input data membutuhkan waktu yang tidak sedikit ditambah lagi dalam tingkat kesulitan dalam penggunaan aplikasi serta masalah-masalah atau *error system* yang mungkin saja terjadi di dalam teknologi. Selain itu Operator harus secara rutin mengisi E-Dalwas apabila terjadi perubahan anggaran baik pagu, penyerapan atau penyesuaian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Data dari Inspektorat Jenderal KKP sampai dengan akhir bulan April 2016 menyebutkan bahwa terdapat 546 satuan kerja atau sebesar 66,99% dari 815 satuan kerja yang sudah berhasil melakukan *upload* data keuangan dan rencana pengadaan. seperti dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Satuan Kerja Meng Upload Data Keuangan dan Rencana Pengadaan

| KD UNIT | NAMA UNIT | JML SATKER | JML SATKER UPLOAD | %-tase |
|---------|----------------------|------------|-------------------|---------|
| 1 | Sekretariat Jenderal | 43 | 22 | 51.16% |
| 2 | Inspektorat Jenderal | 1 | 1 | 100.00% |
| 3 | Ditjen PT | 75 | 75 | 100.00% |
| 4 | Ditjen PB | 262 | 125 | 47.71% |
| 5 | Ditjen PSDKP | 45 | 44 | 97.78% |
| 6 | Ditjen PDSPKP | 135 | 124 | 91.85% |
| 7 | Ditjen PRL | 126 | 29 | 23.02% |
| 11 | BALITBANG KP | 19 | 19 | 100.00% |
| 12 | BPSDMP KP | 58 | 56 | 96.55% |
| 13 | BKIPM | 51 | 51 | 100.00% |
| Jumlah | | 815 | 546 | 66.99% |

Sumber : Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tingkat keaktifan merupakan salah satu indikator bahwa sudah tersediannya informasi terkait kegiatan beserta penyerapannya. Namun kenyataannya laporan yang diinput dan diupload belum mencerminkan kinerja anggaran sebenarnya karena pada laporan tersebut diperoleh fakta akan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyak data target dan anggaran yang satker belum terisi
2. Data sudah terisi tetapi datanya tidak sesuai
3. Data sudah terisi dan sesuai tetapi tidak tepat waktu.

Rosemary Cafasaro dalam O'Brien (2009, hlm. 627) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan antara lain:

1. Dukungan manajemen eksekutif
2. Keterlibatan *end-user* (pengguna akhir)
3. Kejelasan penggunaan kebutuhan perusahaan
4. Kematangan perencanaan
5. Harapan perusahaan yang nyata

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain:

1. Kurangnya input dari *end-user*
2. Tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi
3. Pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah,
4. Kurangnya dukungan manajemen eksekutif
5. Inkompensasi secara teknologi

Seiring telah diterapkannya Sistem Informasi e-Dalwas , maka salah satu faktor yang saat ini memegang peranan penting dalam keberhasilan penerapan dan penggunaan teknologi informasi adalah faktor pengguna. Tingkat kesiapan pengguna untuk menerima teknologi informasi memiliki pengaruh besar dalam menentukan sukses atau tidaknya penerapan teknologi tersebut.

Seperti disampaikan Jogiyanto, (2008, Hal 15) Organisasi mulai bergantung system teknologi informasi. Walaupun manajer-manajer senior yang mengambil informasi, tetapi keberhasilan penggunaan system tersebut juga tergantung dari penerimaan dan penggunaan oleh individual-individual. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari system teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Dari kondisi laporan yang telah disebutkan dalam e-Dalwas yang berasal dari inputan operator satuan kerja sebagai salah satu pengguna sistem informasi tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan pemanfaatan Sistem informasi diantaranya:

1. Inspektorat Jenderal KKP belum sepenuhnya mengetahui persepsi pengguna sistem informasi mereka
2. Inspektorat Jenderal KKP belum sepenuhnya mengukur dan menguji persepsi kepraktisan sistem informasi mereka
3. Inspektorat Jenderal KKP belum sepenuhnya mengetahui seberapa besar persepsi penerimaan dan persepsi kemudahan penggunaan sistem informasi itu dalam membantu pencapaian tujuan mereka melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku *User* dalam menggunakan Sistem Informasi e-Dalwas dan mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi dari kemudahan penggunaan penerimaan Sistem Informasi e-Dalwas demi menunjang upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Pengguna E-Dalwas KKP Dalam Mendukung Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)”**

I.2 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan untuk menilai dan mangkaji pelaku pengguna sistem informasi e-Dalwas dalam upaya peningkatan kinerja organisasi
2. Penelitian menggunakan kerangka model *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan tambahan unsur *Reward/Punishment*.
3. Kinerja organisasi dalam hal ini adalah kinerja anggaran sebagai salah satu indikator peningkatan atau penurunan kinerja organisasi
4. Objek pada penelitian ini adalah para operator pengguna sistem E-Dalwas Lingkup KKP
5. Pengolahan data akan didukung oleh menggunakan *software* Amos dan SPSS.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan judul yang diangkat penulis maka rumusan masalah yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*Perseived Ease of Use/PEOU*) berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan (*Perseived Usefulness/PU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?

2. Apakah persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap sikap pengguna (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use/PEOU*) berpengaruh terhadap sikap pengguna (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
4. Apakah Persepsi pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
5. Apakah Sikap penggunaan (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
6. Apakah Persepsi pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
7. Apakah persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas.
8. Apakah Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
9. Apakah Persepsi pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
10. Apakah persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
11. Apakah sikap penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) berpengaruh terhadap kinerja organisasi (*Organizational Performance/OP*) dalam menggunakan E-Dalwas?

I.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.4.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil pengujian dengan derajat kepercayaan sebesar 95% secara signifikan terhadap pengujian pada sistem e-Dalwas sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use/PEOU*) berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) dalam menggunakan E-Dalwas.
2. Mengetahui nilai pengaruh kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap sikap pengguna (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas.
3. Mengetahui nilai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use/PEOU*) berpengaruh terhadap sikap pengguna (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas.
4. Mengetahui nilai pengaruh Persepsi pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap sikap penggunaan (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) dalam menggunakan E-Dalwas.
5. Mengetahui nilai pengaruh Sikap penggunaan (*Attitude Toward Behaviour/ATB*) berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas.
6. Mengetahui nilai pengaruh pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas.
7. Mengetahui nilai pengaruh persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) dalam menggunakan E-Dalwas.
8. Mengetahui nilai pengaruh Minat perilaku (*Behavioral Intention/BI*) berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas.

9. Mengetahui nilai pengaruh Persepsi pemberian *Reward/Punishment (RP)* berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
10. Mengetahui nilai pengaruh persepsi kemanfaatan (*Perseived Usefulness/PU*) berpengaruh terhadap kondisi nyata penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) dalam menggunakan E-Dalwas ?
11. Mengetahui nilai pengaruh sikap penggunaan (*Actual System Usage/ASU*) berpengaruh terhadap kinerja organisasi (*Organizational Performance/OP*) dalam menggunakan E-Dalwas?

I.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan hasil penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teori

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana ilmu pengetahuan pada bidang manajemen sistem informasi dalam kaitannya dengan nilai kinerja organisasi serta dapat menjadi bahan acuan pustaka untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi masukan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Inspektorat Jenderal dalam rangka pengembangan sistem untuk meningkatkan kualitas sebagai pendukung kemudahan pengawasan dan pengendalian program prioritas Kementerian Kelautan dan perikanan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.